



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau sub kegiatan, penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.
- (3) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA - SKPD.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : Penutup.

- (2) Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
- i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
- o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;

- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024; dan
- dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2024

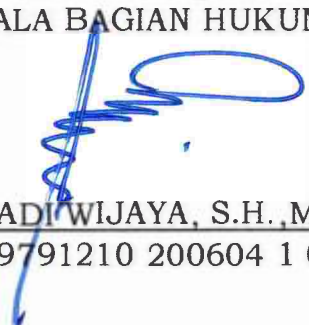
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

8. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaraskan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) juga mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan juga dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta menggali pemasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan. Dan berdasarkan hasil evaluasi Renja tahun 2024 maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan untuk efektivitas pencapaian kinerja yang diinginkan. Oleh karena itu disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024. Selanjutnya Perubahan Renja ini digunakan sebagai pedoman penyusunan KUPAPPAS dan RPAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Blitar ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 20 Tahun 2024 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74).
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 49);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar nomor 48 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 nomor 65);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2024 nomor 28).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Kota Blitar tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kota Blitar mengelola anggaran Belanja sebesar Rp. 24.585.023.720,00 terbagi pada 6 Program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II disampaikan hasil evaluasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
1	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,08		84,96								86,04		86,04		101,13%		
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,08		84,96								86,04		86,04		101,13%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kinerja Program : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,6 indeks	22.387.299.717	83,1 indeks	8.781.801.036	82,8 indeks	4.440.163.921	88 indeks	792.274.064	88,04 indeks	1.451.309.075	88,04 indeks	2.243.583.139	88,04 indeks	11.025.384.175	104,07%	49,25%	Sekretariat
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	71.732.640	100%	59.382.815	100%	15.933.700	26,32%	-	10,53%	1.404.500	36,85 %	1.404.500	100 %	60.787.315	100,00%	84,74%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 dok	43.827.096	12 dok	7.391.045	7 dok	3.093.800	1 dok		0 dok		1 dok		13 dok	7.391.045	41,94%	16,86%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	27.905.544	24 Laporan	51.992.1770	12 Laporan	12.839.900	4 Laporan		2 Laporan	1.404.500	6 Laporan	1.404.500	30 Laporan	53.306.270	62,50%	191,35%	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	17.226.778.113	100%	6.484.525.961	100 %	3.456.909.700	25%	608.922.272	25%	1.217.965.469	50 %	1.826.887.741	100 %	8.311.413.702	100,00%	48,25%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 org/bln	17.199.529.014	25 org/bln	6.474.663.246	26 org/bln	3.455.015.700	26 org/bln	608.922.272	25 org/bln	1.217.965.469	25 org/bln	1.826.887.741	25 org/bln	8.301.550.987	96,15%	48,27%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	48 Laporan	27.249.099	24 Laporan	9.862.715	12 Laporan	1.894.000	3 Laporan	0	3 Laporan	0	6 Laporan	0	30 Laporan	9.862.715	62,50%	36,19%	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	747.869.877	100%	260.530.807	100%	110.100.000	25%	2.834.000	25%	22.532.300	50 %	25.366.300	100 %	285.897.107	100,00%	38,23%	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	170.000.000	4 Paket	56.075.000	2 Paket	30.100.000	0 Paket	-	1 Paket	11.200.000	1 Paket	11.200.000	5 Paket	67.275.000	62,50%	39,57%	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	577.869.877	25 Orang	204.455.807	26 Orang	80.000.000	0 Orang	2.834.000	26 Orang	11.332.300	26 Orang	14.166.300	26 Orang	218.622.107	100,00%	37,83%	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	1.675.778.403	100%	656.975.403	100%	235.444.097	25%	70.689.880	25%	54.272.491	50 %	124.962.371	100 %	781.937.774	100,00%	46,66%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Paket	75.882.128	1 Paket	28.780.800	1 Paket	9.989.500	0,5 Paket	4.994.000	0 Paket	-	0,5 Paket	4.994.000	2 Paket	33.774.800	37,50%	44,51%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	72.000.000	3 Paket	19.587.108	3 Paket	15.747.100	1 Paket	5.204.400	0 Paket	-	1 Paket	5.204.400	4 Paket	24.791.508	33,33%	34,43%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 Paket	117.564.835	5 Paket	75.777.938	5 Paket	24.999.000	1 Paket	-	0 Paket	1.248.000	1 Paket	1.248.000	6 Paket	77.025.938	30,00%	65,52%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 Paket	179.892.658	12 Paket	86.632.650	10 Paket	28.025.000	3 Paket	10.178.100	2 Paket	9.337.800	5 Paket	19.515.900	17 Paket	106.148.550	42,50%	59,01%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	153.906.238	2 Paket	57.260.640	1 Paket	24.000.000	0 Paket	3.997.000	0,5 Paket	8.118.000	0,5 Paket	12.115.000	2,50 Paket	69.375.640	62,50%	45,08%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	89.515.226	24 Dokumen	13.500.000	12 Dokumen	5.400.000	3 Dokumen	900.000	3 Dokumen	1.350.000	6 Dokumen	2.250.000	30 Dokumen	15.750.000	62,50%	17,59%	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	987.017.318	106 Laporan	375.436.267	40 Laporan	127.283.497	11 Laporan	45.416.380	13 Laporan	34.218.691	24 Laporan	79.635.071	130 Laporan	455.071.338	81,25%	46,11%	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	36.205.050	100%	42.804.349	100%	3.000.000	25%	3.000.000	25%	-	50 %	3.000.000	100 %	45.804.349	100,00%	126,51%	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	36.205.050	4 Unit	42.804.349	1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.000.000	0 Unit	-	1 Unit	3.000.000	5 Unit	45.804.349	62,50%	126,51%	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	2.012.231.790	100%	805.577.202	100%	504.153.524	25%	83.362.252	25%	139.192.565	50 %	222.554.817	100 %	1.028.132.019	100,00%	51,09%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	534.881.790	96 Laporan	128.775.462	48 Laporan	87.641.724	12 Laporan	17.842.340	12 Laporan	17.817.053	24 Laporan	35.659.393	120 Laporan	164.434.855	62,50%	30,74%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	1.477.350.000	13 Laporan	676.801.740	13 Laporan	416.511.800	3 Laporan	65.519.912	3 Laporan	121.375.512	6 Laporan	186.895.424	20 Laporan	863.697.164	38,46%	58,46%	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	616.703.844	100%	472.004.499	100%	114.622.900	25%	23.465.660	25%	15.941.750	50 %	39.407.410	100 %	511.411.909	100,00%	82,93%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	448.157.980	15 Unit	172.517.424	15 Unit	77.698.900	3 Unit	13.721.160	1 Unit	15.941.750	4 Unit	29.662.910	15 Unit	202.180.334	88,24%	45,11%	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	160 Unit	105.253.882	50 Unit	66.211.700	40 Unit	26.727.000	15 Unit	9.744.500	0 Unit	-	15 Unit	9.744.500	65 Unit	75.956.200	40,63%	72,16%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	63.291.982	1 Unit	233.275.375	1 Unit	10.197.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	233.275.375	100,00%	368,57%		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		61,45%	72,84%		
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Rendah	Sedang		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		100,00%	71,96%		
Predikat kinerja kegiatan																		Sangat tinggi	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja							Ketersediaan anggaran, penyusunan jadwal kegiatan yang cermat														
Faktor penghambat pencapaian kinerja							Keterbatasan kapasitas SDM														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya							Pertanggungjawaban administrasi kegiatan akan lebih tepat jadwal														

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya						Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil														
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		104,07%	49,25%	
Predikat kinerja program																		Sangat tinggi	Sangat Rendah	
2	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PPKS		Indikator Tujuan : 1. Indeks Keparahan Kemiskinan 2. Persentase PPKS	0,21 7,04%		0,12 7,25%		0.23 7.26%				0.24 6.73%		0.24 6.73%		0.24 6.73%		85,71% 104,40%		
	Sasaran : Meningkatnya Penanganan PPKS		Indikator Sasaran : 1. Persentase Fakir Miskin yang Berdaya 2. Persentase Penurunan PMKS 3. Persentase PPKS yang Terpenuhi Layanan Dasar Bidang Sosial	3,24% 5.89%		1,86 5,25		2.32% 1.49%				2,70% 6,49%		2,70% 6,49%		2,70% 7,85%		83,33% 133,27%		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Program Pemberdayaan sosial	Indikator Program : Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	7.059.716.122	100%	2.907.939.251	100%	700.664.100	100%	199.250.900	100%	171.757.500	100 %	371.008.400	100 %	3.278.947.651	100,00%	46,45%	Bidang Dayasos
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100%	7.059.716.122	100%	2.907.939.251	100%	700.664.100	66,67%	199.250.900	100%	171.757.500	100 %	371.008.400	100 %	3.278.947.651	100,00%	46,45%	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	7.059.716.122	8 Lembaga	2.907.939.251	6 Lembaga	700.664.100	4 Lembaga	199.250.900	2 Lembaga	171.757.500	6 Lembaga	371.008.400	6 Lembaga	3.278.947.651	120,00%	46,45%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		120,00%	46,45%	
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Sangat tinggi	Sangat rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		100,00%	46,45%	
Predikat kinerja kegiatan																		Sangat tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Keaktifan PSKS dalam meningkatkan kapasitasnya secara mandiri														
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Pekerjaan PSKS bersifat sosial sehingga bukan merupakan fokus kegiatan mereka														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya						Memaksimalkan kesempatan pada setiap kegiatan untuk memberikan informasi/tambahan pengetahuan bagi PSKS														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya						Merencanakan program peningkatan kapasitas PSKS untuk pelayanan sosial sesuai kasus-kasus yang menonjol														
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		100,00%	46,45%	
Predikat kinerja program																		Sangat tinggi	Sangat rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	19,69%	4.163.494.368	17,25%	1.930.021.693	0,89%	936.187.250	0%	116.028.900	0%	155.020.600	0,00 %	271.049.500	17,25 %	2.201.071.193	87,61%	52,87%	Bidang Rehabsos
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	3.146.189.907	100%	1.196.330.473	100%	649.794.500	100%	97.583.100	100%	95.605.600	100 %	193.188.700	100 %	1.389.519.173	100,00%	44,17%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Orang	1.826.680.184	125 Orang	724.070.523	130 Orang	347.426.200	130 Orang	42.386.700	130 Orang	64.480.000	130 Orang	106.866.700	130 Orang	830.937.223	89,66%	45,49%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	39.288.855	21 Orang	9.797.500	10 Orang	4.898.000	0 Orang		2 Orang		2 Orang	-	21 Orang	9.797.500	24,71%	24,94%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	540 Orang	840.575.252	156 Orang	368.964.250	325 Orang	268.176.900	101 Orang	52.758.200	66 Orang	20.555.600	167 Orang	73.313.800	323 Orang	442.278.050	59,81%	52,62%	
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	256 Orang	439.645.616	25 Orang	93.498.200	25 Orang	29.293.400	8 Orang	2.438.200	3 Orang	10.570.000	11 Orang	13.008.200	36 Orang	106.506.400	14,06%	24,23%	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	1.017.304.461	100%	733.691.220	100%	286.392.750	100%	18.445.800	100%	59.415.000	100 %	77.860.800	100 %	811.552.020	100,00%	79,77%	
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	515 Orang	750.254.613	324 Orang	585.819.620	360 Orang	241.949.900	150 Orang	9.689.000	135 Orang	55.075.000	285 Orang	64.764.000	609 Orang	650.583.620	118,25%	86,72%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	267.049.848	100 Orang	147.871.600	20 Orang	44.442.850	10 Orang	8.756.800	7 Orang	4.340.000	17 Orang	13.096.800	117 Orang	160.968.400	101,74%	60,28%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		68,04%	49,04%	
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Sedang	Sangat rendah	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		100,00%	61,97%	
Predikat kinerja kegiatan																		Sangat tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja							Efektivitas jejaring kerja sama dengan Dinsos provinsi Jatim, Kab/Kota lain dan pilar-pilar sosial/pelaku usaha kesejahteraan sosial													
Faktor penghambat pencapaian kinerja							Terbatasnya pekerja sosial dari segi kuantitas dan kualitas serta minimnya sarana prasarana pelayanan PPKS, sifat kegiatan penanganan masalah sosial dan populasi PPKS yang dinamis/sering berubah menyebabkan sulitnya memprediksi/memproyeksikan target kinerja													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya							Penanganan PPKS dengan melibatkan unsur keluarga dan masyarakat													

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya						Merencanakan kegiatan penanganan masalah sosial secara spesifik sesuai kebutuhan PPKS berdasarkan hasil assessment														
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		87,61%	52,87%	
Predikat kinerja program																		Tinggi	Rendah	
		Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	6,81%	101.931.470.599	11,37%	38.200.663.250	1,4%	18.256.665.749	0,15%	6.191.599.900	0,51%	5.346.707.050	0,51 %	11.538.306.950	11,83 %	49.738.970.200	173,72%	48,80%	Bidang Linjamsos
			Persentase peningkatan PMKS Terlatih	160%		90,83%		19,5%		20,52%			20,52 %	-	130,00 %	-	81,25%			
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	100%	101.931.470.599	100%	38.200.663.250	100%	18.256.665.749	0%	6.191.599.900	50%	5.346.707.050	50 %	11.538.306.950	100 %	49.738.970.200	100,00%	48,80%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
			Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100%		100%		100%		0%		100%		100 %	-	100 %	-	100,00%		
			Persentase PMKS terlatih	100%		54,5%		20%		23,5%				23,50 %	-	78 %	-	78,00%		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	400 Keluarga	1.350.042.161	337 Keluarga	324.525.050	100 Keluarga	103.955.900	203 Keluarga	-	121 Keluarga	29.960.000	324 Keluarga	29.960.000	661 Keluarga	354.485.050	165,25%	26,26%	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10264 Keluarga	99.325.262.345	9584 Keluarga	36.240.829.220	9584 Keluarga	17.705.478.800	9570 Keluarga	5.808.427.200	9535 Keluarga	5.314.847.050	9.535 Keluarga	11.123.274.250	9.535 Keluarga	47.364.103.470	107,10%	47,69%	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	1.256.166.093	233 Orang	1.635.308.980	105 Orang	447.231.049	94 Orang	383.172.700	0 Orang	1.900.000	94 Orang	385.072.700	327 Orang	2.020.381.680	81,75%	160,84%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										K	Rp	K	Rp								K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		118,03%	78,26%			
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Sangat tinggi	Tinggi			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		92,67%	48,80%			
Predikat kinerja kegiatan																		Tinggi	Sangat rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Sinergi antara Dinas Sosial, mitra kerja dan OPD terkait																
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Data penerima bantuan yang dinamis utamanya Bansos dari pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap program Bansos daerah																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya						Melakukan pemutakhiran data menjelang pemberian Bansos nagi KPM																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya						Menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pemutakhian data																
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		127,48%	48,80%			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
Predikat kinerja program																		Sangat tinggi	Sangat rendah	
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100%	1.906.438.375	100%	759.286.324	100%	216.343.400	100%	6.386.300	100%	28.808.000	100 %	35.194.300	100 %	794.480.624	100,00%	41,67%	Bidang Linjamsos
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100%	312.077.707	100%	277.830.550	100%	47.491.600	100%	5.496.500	100%	-	100 %	5.496.500	100 %	283.327.050	100,00%	90,79%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	111.784.626	33 Orang	217.571.850	40 Orang	22.499.800	8 Orang	4.477.500	0 Orang		8 Orang	4.477.500	41 Orang	222.049.350	34,17%	198,64%	
		Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	200.293.081	130 Orang	60.258.700	60 Orang	24.991.800	14 Orang	1.019.000	30 Orang		44 Orang	1.019.000	174 Orang	61.277.700	62,14%	30,59%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	100%	1.594.360.668	81,48%	481.455.774	90%	168.851.800	25,93%	889.800	25,93%	28.808.000	51,85 %	29.697.800	81,48 %	511.153.574	81,48%	32,06%	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	1.594.360.668	27 Orang	481.455.774	27 Orang	168.851.800	7 Orang	889.800	7 Orang	28.808.000	27 Orang	29.697.800	27 Orang	511.153.574	100,00%	32,06%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		67,08%	115,35%	
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Sedang	Sangat tinggi	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		90,74%	61,42%	
Predikat kinerja kegiatan																		Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja							Sinergi dan kerja sama dengan OPD terkait/mitra kerja/stake holder terkait													

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Bencana terjadi sewaktu-waktu sehingga perencanaan kebutuhan anggaran bersifat penjagaan														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya						Melakukan pendataan bersamaan dengan terjadinya bencana														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya						Tetap mengalokasikan anggaran untuk penjagaan apabila terjadi bencana														
Rata-rata capaian kinerja program (%)																100,00%	41,67%			
Predikat kinerja program																Sangat tinggi	Sangat rendah			
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	100%	343.296.298	100%	158.660.300	100%	34.999.300	100%	1.635.700	100%	4.431.100	100 %	6.066.800	100 %	164.727.100	100,00%	47,98%	Bidang Dayasos
		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100%	343.296.298	100%	158.660.300	100%	34.999.300	100%	1.635.700	100%	4.431.100	100 %	6.066.800	100 %	164.727.100	100,00%	47,98%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	983 Makam	343.296.298	975 Makam	158.660.300	975 Makam	34.999.300	975 Makam	1.635.700	975 Makam	4.431.100	975 Makam	6.066.800	975	164.727.100	99,19%	47,98%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		99,19%	47,98%	
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Tinggi	Sangat rendah	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		100,00%	47,98%	
Predikat kinerja kegiatan																		Sangat tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja							Kecukupan anggaran dan koordinasi yang baik antara stake holder terkait													
Faktor penghambat pencapaian kinerja							Keterbatasan anggaran yang tersedia													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya							Memaksimalkan SDM dan anggaran untuk pemeliharaan TMP													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya							Tetap mengalokasi anggaran untuk pemeliharaan TMP karena merupakan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi secara berkelanjutan													

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		100,00%	47,98%			
Predikat kinerja program																		Sangat tinggi	Sangat rendah			

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 capaian kinerja Dinas Sosial Kota Blitar sampai dengan tribulan II sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Program ini merupakan program yang menunjang program teknis dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Indikator program adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 82,8 dan realisasi 88,04 sehingga capaian kinerja 106,33%.
Pada program ini terdapat 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan dan secara umum pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, demikian pula target kinerja dan realisasi anggaran tercapai sesuai pentahapan yang direncanakan.
2. Program Pemberdayaan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial menitikberatkan pada upaya peningkatan kapasitas dan keaktifan PSKS yang terdiri dari TKSK, PSM, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Disamping itu juga mengadakan pembinaan organisasi sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan. Dari indikator program Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditetapkan target 100% dan tercapai 100%. Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dimana baik target kinerja maupun realisasi keuangan tercapai sesuai target.
3. Program Rehabilitasi Sosial
Salah satu layanan kesejahteraan adalah rehabilitasi sosial yang bertujuan memberikan layanan dasar rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan jenis layanan sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh pekerja sosial.
Indikator program ini adalah persentase peningkatan PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dengan target 0,89%. Indikator ini diukur pada akhir tahun anggaran sehingga pada tribulan II belum bisa dihitung capaiannya. Namun dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan capaian kinerjanya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, termasuk realisasi anggarannya. Sampai dengan tribulan II sebanyak 612 PPKS dan kelaurganya telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pada program ini ada 2 indikator program yaitu :
 - a. Persentase penurunan rumah tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial, target 1,4% dengan realisasi 0,51%, capaian kinerja 36,43%. Target kinerja belum tercapai karena tahapan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial dilakukan secara berkala dan masih ada satu tahapan pemberian bantuan sosial lagi untuk mempercepat pencapaian target kinerja.
 - b. Persentase peningkatan PMKS terlatih target 19,5% realisasi 20,52%, capaian kinerja 105,23% sehingga target kinerja telah terpenuhi. Kegiatan yang mendukung indikator ini berupa pelatihan keterampilan bagi PMKS/PPKS dan pemberian alat bantu dengan harapan selesai pelatihan mereka akan bisa merintis usaha/bekerja guna memperoleh tambahan penghasilan.
5. Program Penanganan Bencana
Meskipun bencana terjadinya sewaktu-waktu dan tidak bisa diprediksi namun Dinas Sosial tetap mengalokasi anggaran yang bersifat penjangaan berupa bantuan paket sembako bagi korban bencana dan kelompok rentan. Sampai dengan tribulan II dari 8 korban bencana dan 44 orang kelompok rentan dalam hal ini warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya telah mendapatkan bantuan paket sembako sehingga indikator kinerja program persentase korban bencana yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota yang ditargetkan 100% telah terealisasi 100%, dengan capaian kinerja 100%.

Pada program ini terdapat pula kegiatan untuk peningkatan kapasitas Tagana dalam penanganan korban bencana dengan indikator kegiatan persentase Tagana yang terampil dalam penanganan pasca bencana dimana dari target 90% terealisasi 51,85%.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sesuai tugas dan fungsi, Dinas Sosial tugas mandatori berupa pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Dalam pelaksanaannya pemeliharaan TMP Raden Wijaya dilaksanakan secara rutin yang menyangkut kebersihan, keindahan, pemenuhan sarana dan prasarana sehingga tetap dalam kondisi baik. Indikator kinerja program persentase TMP dalam kondisi baik yang ditargetkan 100% terealisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100%.

Dalam rangka mencapai target kinerja perangkat daerah yang ingin dicapai pada tahun 2024 ini maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM PSKS khususnya TKSK, PSM, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tagana melalui pembinaan pembinaan/Bimtek bagi PPKS secara berkelanjutan dengan materi permasalahan PPKS yang menonjol.
2. Penyediaan data dan pemetaan karakteristik PPKS yang memadai melalui assessment yang mendalam untuk mengidentifikasi jenis layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan PPKS.
3. Optimalisasi layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS melalui peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku kesejahteraan sosial diantaranya instansi/lembaga dan stake holder terkait di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kab/Kota lain serta Kementerian Sosial .

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial bertolak pada pencapaian visi dan misi Kota Blitar yang ingin dicapai yang dijabarkan dan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026, Perubahan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kota Blitar. Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang mengemban misi ketiga Kota Blitar yaitu berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan evaluasi SAKIP tahun 2023 maka disusun pohon kinerja sehingga terdapat perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	85	86,04
	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	85	86,04
2	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin	0,23	0,23
		Persentase PPKS	PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kewenangan kota dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	7,26	6,73
	Sasaran : Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin yang telah menerima pelatihan keterampilan dan mulai merintis usaha/bekerja dan/atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos yang graduasi mandiri (kondisi sosial ekonominya sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah	2,32%	2,70%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial)		
		Persentase penurunan PPKS	Persentase penurunan PPKS adalah selisih jumlah PPKS tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam persen, dimana PPKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	1,49%	6,49%
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	- PPKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kewenangan kota dengan 24 kategori (sesuai Permensos RI no 8 th 2012 bukan korban HIV/Aids dan NAPZA) - PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial adalah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial kewenangan Kab/Kota	91,19%	93,09%

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja maka setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, maka didalamnya memuat langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Adapun langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut LKjIP tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin	Meningkatkan kapasitas fakir miskin melalui pelatihan keterampilan dan Bansos peralatan usaha	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Menyelenggarakan program Bantuan Sosial bagi fakir miskin yang tepat sasaran	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
2	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS	Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS/PPKS agar meningkat fungsi sosialnya sehingga bisa hidup wajar di masyarakat	- Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
		Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	- Program Penanganan bencana - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
		Meningkatkan kapasitas PSKS dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial	- Program Pemberdayaan Sosial - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan tribulan 2 tahun 2024 serta dalam rangka mengoptimalkan pengalokasian anggaran guna pencapaian target kinerja Dinas Sosial, diperlukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2023 dengan tetap mempedomani RPJMD Kota Blitar dan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar. Pada Perubahan Renja 2024 ini tidak terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan namun hanya menyesuaikan target kinerja serta anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun Rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
01.06.01	Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,8 Indeks	88,5 Indeks			
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %			
1.06.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.839.900	2.839.900	Mengurangi belanja jasa konsultansi analisis IKM
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %			
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org/bln	25 Org/bln	3.455.015.700	3.460.017.200	Menyesuaikan kenaikan gaji ASN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %			
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	9.989.500	10.989.500	Menambah volume penyediaan komponen instalasi listrik menyesuaikan kebutuhan
1.06.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	12 Paket	28.025.000	31.025.000	Menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk rapat/kegiatan kedinasan
1.06.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	45 Laporan	127.283.497	169.530.930	Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %			
1.06.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6 Unit	3.000.000	41.999.920	Menambah sarpras kantor berupa laptop, HP, printer
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.06.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	87.641.724	78.098.448	Menyesuaikan kebutuhan berdasarkan estimasi tagihan dari penyedia
1.06.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	416.511.800	402.511.800	Menyesuaikan kebutuhan gaji THL
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %			
1.06.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.197.000	20.197.000	Menambah untuk rebranding bumi bungkarbo dan pengadaan papan nama dinas
01.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	100 %			
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif						Keterangan
			Target 2024				Pagu Indikatif		
			Semula		Menjadi		Semula	Menjadi	
1.06.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga		7 Lembaga		700.664.100	816.454.323	Untuk Bimtek peningkatan kapasitas SDM Kesos
01.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,89 %		0,89 %				
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %		100 %				
1.06.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	130	Org	130	Org	347.426.200	355.026.200	Menambah volume pemberian makanan sehat siap konsumsi bagi Lansia terlantar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.06.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	321 Org	325 Org	268.176.900	279.175.300	Tambahan anggaran untuk bimbingan sosial bagi anak bermasalah sosial
1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org	25 Org	29.293.400	40.636.600	Menyesuaikan dengan kebutuhan untuk layanan rujukan bagi PPKS
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %			
1.06.04.2.02.0007	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Org	360 Org	241.949.900	265.549.900	Untuk kegiatan Hari Disabilitas Internasional
1.06.04.2.02.0013	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	44.442.850	50.842.850	Menyesuaikan dengan kebutuhan untuk layanan rujukan bagi PPKS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
01.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,4 %	1,4 %			
		Persentase peningkatan PMKS Terlatih	19,5 %	20,52 %			
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	100 %	100 %			
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %	100 %			
		Persentase PMKS terlatih	20 %	23,5 %			
1.06.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	400 Keluarga	103.955.900	103.955.900	Penyesuaian target kinerja berdasarkan capaian triwulan II yang sudah melampaui target
1.06.05.2.02.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9584 Keluarga	9532 Keluarga	17.705.478.800	17.380.616.000	Penyesuaian anggaran berdasarkan kontrak kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.06.05.2.02.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	101 Orang	447.231.049	435.592.049	Penyesuaian anggaran berdasarkan kontrak kerja
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	100 %	34.999.300	52.579.700	
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100 %	100 %	34.999.300	52.579.700	
1.06.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	974 Makam	979 Makam	34.999.300	52.579.700	Untuk pengecatan gapura TMP

Sedangkan rekapitulasi perubahan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 selengkapnya sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

PerubahanRumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					24.771.263.491	24.585.023.720	24.508.539.720							25.746.610.047	
01:06:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks	82,8 indeks	88,5 indeks	4.491.536.521	4.440.163.921	4.506.869.498	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	89 indkes	4.679.591.392	Sekretariat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	16.207.200	15.933.700	5.933.700	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	5.933.200	
1.06.01.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 dok	7 dok	7 dok	3.093.800	3.093.800	3.093.800	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	6 dok	3.093.500	
1.06.01.2.0 1.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 laporan	12 laporan	12 laporan	13.113.400	12.839.900	2.839.900	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	12laporan	2.839.700	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	3.543.108.900	3.456.909.700	3.461.911.200	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	3.576.710.248	
1.06.01.2.0 2.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 org/bln	28 org/bln	25 org/bln	3.540.015.300	3.455.015.700	3.460.017.200	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	26 org/bln	3.574.342.748	
1.06.01.2.0 2.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	48 laporan	12 laporan	12 laporan	3.093.600	1.894.000	1.894.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	12 laporan	2.367.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuia standar	100%	100%	100%	110.100.000	110.100.000	110.100.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	141.758.432	
1.06.01.2.0 5.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 paket	2 paket	2 paket	30.100.000	30.100.000	30.100.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	2 paket	46.616.000	
1.06.01.2.0 5.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	26 Orang	28 Orang	25 orang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	27 orang	95.142.432	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	233.970.997	235.444.097	281.691.530	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	275.795.234	
1.06.01.2.0 6.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 paket	1 paket	1 paket	9.989.500	9.989.500	10.989.500	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	1 paket	9.990.700	
1.06.01.2.0 6.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	3 paket	3 paket	15.747.100	15.747.100	15.747.100	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	3 paket	15.758.300	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.0 6.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 paket	5 paket	5 paket	24.999.000	24.999.000	24.999.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	6 paket	25.453.100	
1.06.01.2.0 6.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 paket	10 paket	12 paket	28.025.000	28.025.000	31.025.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	10 paket	30.713.600	
1.06.01.2.0 6.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	1 paket	25.241.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.0 6.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	5.400.000	5.400.000	5.400.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	12 dokumen	5.400.000	
1.06.01.2.0 6.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	40 laporan	45 laporan	125.810.397	127.283.497	169.530.930	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	40 laporan	163.238.534	
1.06.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	3.000.000	3.000.000	41.999.920	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	42.875.877	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.0 7.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	2 unit	6 unit	3.000.000	3.000.000	41.999.920	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	7 unit	42.875.877	
1.06.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	470.526.524	504.153.524	480.610.248	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	515.772.324	
1.06.01.2.0 8.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 laporan	48 laporan	48 laporan	87.641.724	87.641.724	78.098.448	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	48 laporan	87.486.324	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.0 8.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 laporan	13 laporan	13 laporan	382.884.800	416.511.800	402.511.800	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	13 laporan	428.286.000	
1.06.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	114.622.900	114.622.900	124.622.900	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	120.746.077	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.0 9.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	15 unit	15 unit	77.698.900	77.698.900	77.698.900	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	15 unit	78.013.077	
1.06.01.2.0 9.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	160 unit	40 unit	40 unit	26.727.000	26.727.000	26.727.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	58 unit	32.733.000	
1.06.01.2.0 9.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	10.197.000	10.197.000	20.197.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan	ASN Dinsos	1 unit	10.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dan Bangunan Lainnya										dan berdaya saing	Kemiskinan dan Pengangguran				
01:06:02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	635.537.100	700.664.100	816.454.323	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	845.939.600	Bidang Dayasos
1.06.02.2.0 3	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	635.537.100	700.664.100	816.454.323	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	845.939.600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.02.2.0 3.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	8 lembaga	7 lembaga	635.537.100	700.664.100	816.454.323	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PSKS, Orsos	5 lembaga	845.939.600	
01:06:04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	19,69%	0,89%	0,89%	936.187.250	936.187.250	996.128.850	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		0,88	879.712.700	Bidang Rehabsos

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.04.2.0 1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	649.794.500	649.794.500	679.736.100	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	879.712.700	
1.06.04.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	145 orang	130 orang	130 orang	347.426.200	347.426.200	355.026.200	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS	135 orang	381.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.04.2.0 1.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 orang	10 orang	10 orang	4.898.000	4.898.000	4.898.000	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS	30 orang	11.372.900	
1.06.04.2.0 1.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	540 orang	321 orang	325 orang	268.176.900	268.176.900	279.175.300	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS	482 orang	439.921.700	
1.06.04.2. 01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	256 orang	10 orang	25 orang	29.293.400	29.293.400	40.636.600	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan	PPKS	30 orang	46.918.100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan berdaya saing	dan Pengangguran				
1.06.04.2.0 2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	286.392.750	286.392.750	316.392.750	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran				
1.06.04.2.0 2.0007	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	515 orang	360 orang	360 orang	257.837.900	241.949.900	265.549.900	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.04.2. 02.0013	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 orang	20 orang	20 orang	28.554.850	44.442.850	50.842.850	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS			
01.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	6,81%	1,40%	1,40%	18.456.661.620	18.256.665.749	17.920.163.949	Kota Blitar	DAU, DBHC HT	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		1,42%	19.089.977.955	Bidang Linjamsos
		Persentase peningkatan PMKS Terlatih	160%	19,50%	20,52%				Kota Blitar	DAU, DBHC HT	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan		16,30%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan berdaya saing	dan Pengangguran				
1.06.05.2.0 2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	100%	100%	100%	18.456.661.620	18.256.665.749	17.920.163.949	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	19.089.977.955	
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100%	100%	100%				Kota Blitar	DAU, DBHC HT	Meningkatk an sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%		
		Persentase PMKS terlatih	100%	20%	23,50%				Kota Blitar	DAU, DBHC HT	Meningkat kan sumber daya manusia	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan		20%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran				
1.06.05.2.0 2.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	400 keluarga	100 keluarga	400 keluarga	103.955.900	103.955.900	103.955.900	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Warga miskin dan rentan	100 keluarga	103.955.900	
1.06.05.2.0 2.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10264 keluarga	9584 keluarga	9532 keluarga	17.723.474.671	17.705.478.800	17.380.616.000	Kota Blitar	DAU, DBHC HT	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Warga miskin dan rentan	9572 keluarga	18.538.791.171	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.05.2.0 2.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400 keluarga	80 keluarga	101 orang	629.231.049	447.231.049	435.592.049	Kota Blitar	DAU, DBHC HT	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Warga miskin dan rentan	80 orang	447.230.884	
01:06:06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100%	100%	100%	216.341.700	216.343.400	216.343.400	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	216.343.400	Bidang Linjamsos
1.06.06.2.0 1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100%	100%	100%	47.491.600	47.491.600	47.491.600	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan		100%	62.491.600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan berdaya saing	dan Pengangguran				
1.06.06.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	70 orang	40 orang	22.499.800	22.499.800	22.499.800	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Korban Bencana	30 orang	22.499.800	
1.06.06.2.0 1.0004	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	280 orang	89 orang	60 orang	24.991.800	24.991.800	24.991.800	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Warga miskin yang sakit/mend apat musibah lainnya	60 orang	39.991.800	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.06.2.0 2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	100%	90%	90%	168.850.100	168.851.800	168.851.800	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		94%	153.851.800	
1.06.06.2.0 2.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 orang	28 orang	27 orang	168.850.100	168.851.800	168.851.800	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Tagana	27 orang	153.851.800	
01:06:07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	100%	100%	100%	34.999.300	34.999.300	52.579.700	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan		100%	35.045.000	Bidang Dayasos

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan berdaya saing	dan Pengangguran				
1.06.07.2.0 1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100%	100%	100%	34.999.300	34.999.300	52.579.700	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	35.045.000	
1.06.07.2.0 1.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	983 makam	974 makam	979 makam	34.999.300	34.999.300	52.579.700	Kota Blitar	DAU	Meningkat kan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	TMP Raden Wijaya	979 makam	35.045.000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Sosial Kota Blitar memberikan gambaran perubahan target kinerja dan kerangka pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Sosial Kota Blitar di tahun 2024 dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024. Perubahan Rencana Kerja ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun tahun berjalan.

1.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

Perubahan Renja ini disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target kinerja dan kerangka pendanaannya, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

1.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi, Dinas Sosial merencanakan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator/target indikator serta kebutuhan anggaran berpedoman pada Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024.
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, pilar-pilar sosial dan seluruh stake holder dalam pelaksanaan Perubahan Renja ini sehingga akan dicapai hasil kinerja yang optimal.
- c. Meningkatkan kapasitas SDM agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan tuntutan perkembangan layanan bidang sosial.

Akhirnya, Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024.